

OPTIMALISASI PERAN SATGAS TNI GUNA MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PULAU TERLUAR INDONESIA DALAM MENJAGA KEDAULATAN NKRI

Alberto Sahat Parulian Nainggolan¹⁾, Budi Setyoko²⁾, (KH) Marihot³⁾
Markas Besar Angkatan Laut Sekolah Staf Dan Komando
e-mail: albertonainggolan13@gmail.com^{1,2,3)}

Abstract

The role of the Outer Islands Security Task Force so that it can achieve maximum goals, optimize synergy and integration between the TNI and ministries and government agencies in empowering the outer islands so that the existence of these islands can be used for the interests and progress of the nation, and optimizing the empowerment of human resources (HR) those who carry out security duties in order to be able to make a positive contribution to the empowerment of the outer islands during their service without neglecting their main duties. The problem is that the Command and Control (kodal) which is under the Military Regional Command (Kodam) is deemed ineffective, the synergy between the TNI and the Ministries / related government agencies in the management and empowerment of the outer islands has not been optimal and human resource empowerment and professionalism have not been optimal. owned by soldiers in carrying out the task of securing the outer islands. The role of the TNI task force in securing the outer islands of Indonesia will be very helpful in increasing the empowerment of the outer islands of Indonesia, especially in the discussion on this paper by Individuals, the author discusses the Western region, if controlled by the right unit. Command and control to optimize the role of the TNI task force in securing the outer islands is very influential, because with command and control that knows about marine and maritime science and knowledge, it will make it easier for the task force to carry out its duties and optimize its role on the outer islands.

Keywords: Optimization, Empowerment, Human Resources

Abstrak

Peran dari satgas Pengamanan Pulau Terluar sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih maksimal, mengoptimalkan sinergitas dan keterpaduan antara TNI dan kementerian dan lembaga pemerintahan dalam pemberdayaan pulau terluar agar keberadaan pulau tersebut dapat digunakan untuk kepentingan dan kemajuan bangsa, serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan tugas pengamanan agar mampu memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan pulau-pulau terluar selama mereka berdinis dengan tidak mengesampingkan tugas pokok yang diemban. permasalahan tersebut adalah Komando dan Pengendalian (kodal) yang berada dibawah Komando Daerah Militer(Kodam) dipandang kurang efektif, belum optimalnya sinergitas antara TNI dan Kementerian/Lembaga pemerintahan terkait dalam pengelolaan dan pemberdayaan pulau-pulau terluar serta belum optimalnya pemberdayaan sumber daya manusia dan profesionalisme yang dimiliki oleh prajurit – prajurit dalam pelaksanaan tugas pengamanan pulau terluar. Peran satgas TNI pengamanan pulau terluar Indonesia akan sangat membantu dalam meningkatkan pemberdayaan pulau terluar Indonesia khususnya dalam pembahasan pada kertas karya Perorangan ini peneliti membahas diwilayah Barat, apabila dikendalikan oleh satuan yang tepat. Komando dan pengendalian untuk mengoptimalkan peran satgas TNI pengamanan pulau terluar sangatlah berpengaruh, karena dengan Komando dan pengendalian yang mengetahui tentang ilmu dan pengetahuan tentang kelautan dan kemaritiman maka kan memudahkan bagi satgas untuk melaksanakan tugasnya dan mengoptimalkan perannya di pulau terluar.

Kata kunci: Optimalisasi, Pemberdayaan, Sumber Daya Manusia

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri dari 17.504 pulau besar dan kecil (Talumantak, 2018), yang membentang di khatulistiwa dari bujur 95° sampai 141° Timur dan dari 6° LU sampai 11 LS. Luas wilayah itu kurang lebih 9 juta km² (Wahyono,2009). Ketetapan Indonesia sebagai negara kepulauan tersebut ditetapkan melalui penetapan *UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea)* pada sidang PBB tahun 1982 di Montego Bay dan telah diratifikasi oleh Indonesia pada Undang – Undang RI Nomor 17 Th. 1985, maka kedaulatan wilayah negara Indonesia pada wilayah darat, laut dan udara, menjadi hak mutlak, terutama diwilayah perbatasan terluar yang berlokasi pada pulau – pulau terluar (Wiratama,2010). Keberadaan pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki arti yang sangat strategis yaitu sebagai titik dasar dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan landas kontinen Indonesia (Ditjen Strahan,2007). Jika dilihat dari kondisi geografis Indonesia atas keberadaan pulau-pulau terluar, setidaknya terdapat tiga fungsi penting dari pulau-pulau terluar tersebut yaitu sebagai fungsi pertahanan dan keamanan, sebagai fungsi ekonomi, dan sebagai fungsi ekologi (Sasmini,2009). Melihat fungsi penting dari pulau-pulau terluar tersebut, dibutuhkan pengelolaan dan pengamanan yang baik dari pemerintah Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai dengan UU No 3 Tahun 2002 pasal 10 tentang pertahanan negara menyebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Makahingide,2021) dan UU No 34 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan TNI memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam pengamanan pulau – pulau terluar, maka dari itu dibentuknya suatu satgas merupakan langkah yang tepat diambil TNI untuk menjalankan amanat dari Undang – undang tersebut.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Pulau Kecil terluar tercatat ada 92 pulau terluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ke 92 pulau tersebut berbatasan dengan 10 negara tetangga yaitu: Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Republik Palau, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam, sedangkan 9 pulau lainnya berbatasan dengan Samudera Hindia (Adiyanto,2007), dan dari 92 pulau-pulau kecil terluar tersebut, ada 12 pulau yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi secara pertahanan dan keamanan. Dalam penelitian ini menitik beratkan peran satgas TNI pada pemberdayaan pulau-pulau terluar khususnya di wilayah barat yaitu Pulau Rondo, Pulau Berhala dan Pulau Sekatung. Untuk menjaga dan mengawasi pulau – pulau tersebut Satgas TNI yang melaksanakan pengamanan di pulau- pulau terluar saat ini khususnya di

wilayah barat, dilaksanakan oleh 1 (satu) Kompi, berjumlah 88 personil yang terdiri dari TNI AD dan TNI AL, dengan dislokasi pasukan di Pulau Berhala 34 personil, di Pulau Rondo 34 personil, dan di Pulau Sekatung 20 personil. Hingga saat ini satgas pengamanan pulau terluar sudah dilaksanakan yang ke XX (Kemhan,2010). Pelaksanaan satgas pengamanan TNI saat ini, berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/153/2007 tanggal 2 mei 2007 menyebutkan dalam pelaksanaan operasi pengamanan pulau – pulau terluar, komando dan pengendalian berada di bawah Komando Daerah Militer (Kodam) setempat. Dan untuk Satgas Pengamanan Pulau Terluar wilayah barat dalam pelaksanaannya dibawah kendali operasi 2 (dua) Komando Daerah Militer (Kodam) yaitu Kodam I/BB dan kodam Iskandar Muda, dan waktu pelaksanaan tugas pengamanan tersebut dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan. Dalam pelaksanaan tugasnya kedepan diharapkan adanya perubahan dari organisasi tugas pengamanan ini yang sesuai dengan medan juangnya, dimana hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan fungsi dan peran dari satgas Pengamanan Pulau Terluar sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih maksimal, mengoptimalkan sinergitas dan keterpaduan antara TNI dan kementerian dan lembaga pemerintahan dalam pemberdayaan pulau terluar agar keberadaan pulau tersebut dapat digunakan untuk kepentingan dan kemajuan bangsa, serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan tugas pengamanan agar mampu memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan pulau-pulau terluar selama mereka berdinamika dengan tidak mengesampingkan tugas pokok yang diemban.

Dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh prajurit – prajurit TNI untuk menjaga dan mengamankan pulau terluar masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan pimpinan TNI, adapun permasalahan tersebut adalah Komando dan Pengendalian (kodal) yang berada dibawah Komando Daerah Militer(Kodam) dipandang kurang efektif, belum optimalnya sinergitas antara TNI dan Kementerian/Lembaga pemerintahan terkait dalam pengelolaan dan pemberdayaan pulau-pulau terluar serta belum optimalnya pemberdayaan sumber daya manusia dan profesionalisme yang dimiliki oleh prajurit – prajurit dalam pelaksanaan tugas pengamanan pulau terluar.

Sosialisasi akan arti pentingnya pulau terluar Indonesia perlu terus di tingkatkan bagi prajurit–prajurit yang akan melaksanakan penugasan,perlu adanya aturan/ketentuan yang tegas untuk mengatur penanganan terhadap setiap permasalahan perbatasan yang terjadi. Dengan adanya sosialisasi terhadap prajurit yang akan melaksanakan tugas dan penyiapan

aturan/ketentuan yang tegas terhadap permasalahan yang terjadi dapat meningkatkan koordinasi sesama institusi TNI serta kementerian dan lembaga pemerintahan di daerah dalam melaksanakan tugasnya nanti. Hal yang tak kalah pentingnya untuk pengoptimalan tugas satgas TNI ini adalah adanya evaluasi pasca penugasan yang dilaksanakan oleh Mabes TNI dan seluruh Kotama yang terlibat. Maka dengan adanya optimalisasi peran satgas TNI ini diharapkan pemberdayaan pulau – pulau terluar dapat ditingkatkan karena memiliki arti yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia, dan tugas TNI dalam bidang pertahanan dan keamanan dapat terlaksana dengan baik, sehingga keutuhan dan kedaulatan NKRI dapat terjaga dari segala bentuk pelanggaran dan ancaman.

METODE

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian Taskap ini adalah menggunakan kualitatif dan kuantitatif, dengan metode penelitian deduktif. Secara rinci, metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 1) Landasan pemikiran menggunakan *Content Analysis* untuk mengkaji aturan-aturan dan teori yang digunakan dalam penelitian Peran Satgas TNI. Di samping itu juga menggunakan kajian pustaka untuk mendapatkan gambaran penelitian sebelumnya yang memastikan secara teori dan empirik tentang Peran Satgas TNI pada pengamanan pulau terluar; 2) Analisa kondisi saat ini menggunakan penggalan data sekunder dan data primer yang di peroleh dari lingkungan Kotama Korps Marinir dan secara khusus dari pengalaman pribadi serta prajurit yang telah melaksanakan penugasan. Selain itu analisa juga dilaksanakan melalui pengisian kuesioner, wawancara dan *focus group discussion* (FGD) yang dilaksanakan analisis secara kualitatif deskriptif; 3) Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi dilaksanakan dengan wawancara dan kuesioner pada lingkungan Kotama korps Marinir, Sops Mabesal, Sops TNI untuk menemukan peluang dan kendala; 4) Analisis kondisi yang diharapkan menggunakan data di lingkungan TNI/ TNI AL serta secara khusus pada para prajurit yang telah melaksanakan satgas pengamanan pulau terluar dan data dari kuesioner serta dilaksanakan analisis secara kualitatif deskriptif. Penyusunan kebijakan dilaksanakan menggunakan analisis penyusunan kebijakan dengan memperhatikan peluang dan kendala serta kriteria keberhasilan. Selanjutnya Analisis penyusunan strategi menggunakan analisis SWOT. Serta menentukan upaya – upaya berdasarkan kebijakan dan strategi yang di dapat dengan metode Kuantitatif. Pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian lapangan, studi kepustakaan, dan observasi sebagai suatu bentuk pendekatan yang bersifat empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemecahan masalah yang terkait dengan Optimalisasi Peran Satgas TNI Pengamanan Pulau Terluar. Optimalisasi Peran Satgas TNI Pengamanan Pulau Terluar tersebut dituangkan ke dalam rumusan kebijakan yang dijabarkan dalam bentuk strategi-strategi yang didasarkan pada pertimbangan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Optimalisasi Peran Satgas TNI Pengamanan Pulau Terluar akan dapat dicapai dengan baik apabila kendala-kendala dari sisi Komando dan Pengendalian, Sinergitas TNI dan Kementrian/Lembaga dan Pemberdayaan Sumber Daya yang ada saat ini sudah dapat di atasi dengan optimal. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan dengan memanfaatkan peluang yang ada sehingga mampu memberikan nilai positif dalam mempercepat penyelesaian masalah.

Untuk menentukan strategi yang akan digunakan, terlebih dahulu harus dirumuskan kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dasar dalam menentukan strategi yang tepat. Setelah di tentukannya strategi yang baik untuk dilaksanakan, barulah dapat dilaksanakan upaya – upaya secara nyata sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah ditentukan sebelumnya guna memecahkan permasalahan yang ditemukan. Perumusan kebijakan merupakan solusi dari masalah dan pokok persoalan dengan tetap mempertmbangkan pekuang dan kendala serta kekuatan dan kelemahan untuk mencapai sasaran dengan indikator keberhasilan.

Perumusan kebijakan, strategi dan paya yang dilakukan dengan metode SWOT, hal tersebut agar apa yang menjadi rumusan pemedaan masalah dapat tepat sasaran sesuai dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Rumusan Optimalisasi Peran Satgas TNI Pengamanan Pulau Terluar

Masalah	Belum optimalnya peran satgas TNI pengamanan pulau terluar saat ini dalam meningkatkan pemberdayaan pulau terluar indonesia khususnya di wilayah barat.
Pokok Persoalan	a. Komando dan pengendalian yang terlaksana saat ini dipandang tidak efektif. Saat ini Komando dan Pengendalian satgas TNI pengamanan pulau terluar berada di bawah Kotama TNI AD yaitu Komando Daerah Militer (Kodam), untuk Pulau Berhala dan Pulau Sekatung berada di bawah kendali Kodam I/BB, dan Pulau Rondo berada di bawah kendali Kodam Iskandar Muda. b. Sinergitas TNI dan Kementrian/Lembaga pemerintahan. Hingga saat ini peran dari Kementrian/Lembaga pemerintahan terhadap pemberdayaan pulau – pulau terluar khususnya di wilayah barat, masih belum dapat di rasakan oleh prajurit yang berada di pulau yang berperan untuk melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan.

	<p>c. Belum optimalnya pemberdayaan sumber daya manusia (prajurit) yang melaksanakan pengamanan di pulau - pulau terluar, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka tentang kemaritiman dan belum adanya program pada latihan prasadgas yang melibatkan pengetahuan tentang kemaritiman.</p>
Peluang	<p>a. Kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia b. Kebijakan pemerintah melalui program Nawa Cita. c. Kebijakan pertahanan negara pada tahun 2018.</p>
Kendala	<p>a. Posisi Indonesia dikelilingi oleh dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta diapit oleh dua benua besar, yaitu Benua Asia dan Benua Australia. b. Kejahatan lintas negara. c. Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita dan dapat merusak ketahanan nasional.</p>
Indikator Keberhasilan	<p>a. Optimalisasi peran satgas TNI pengamanan pulau terluar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terwujudnya alih kodan dari Komando Daerah Militer (Kodam) kepada Koarmada I akan memudahkan bagi Satgas TNI Pengamanan Pulau Terluar untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapi oleh satgas tersebut di lapangan. Dengan adanya unsur – unsur pelaksana di bawah Koarmada I, dapat membantu pelaksanaan satgas pengamanan pulau terluar sehingga berjalan dengan baik tanpa perlu tindakan administrasi untuk berkoordinasi kepada Mabes TNI. 2) Terwujudnya sinergitas TNI dan Kementrian/Lembaga pemerintahan untuk meningkatkan pemberdayaan pulau terluar, akan memberikan kemampuan personil satgas dalam hal kemaritiman. Peran Satgas TNI Pengamanan Pulau Terluar akan dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar pulau terluar tersebut dengan kegiatan – kegiatan yang melibatkan masyarakat baik fisik ataupun nonfisik 3) Meningkatnya pemberdayaan sumber daya manusia yang akan melaksanakan penugasan pengamanan pulau terluar ditandai dengan peran aktif personil satgas dalam pemberdayaan pulau terluar, baik terhadap SDM pada masyarakat sekitar pulau maupun pemberdayaan terhadap potensi SDA yang ada di pulau tersebut. <p>b. Peningkatan pemberdayaan pulau terluar. Terwujudnya pemberdayaan pulau terluar dengan peran aktif Satgas TNI Pengamanan Pulau Terluar dapat memberikan kontribusi positif pada masyarakat sekitar dan dapat meminimalisir segala bentuk pelanggaran di laut sekitar pulau terluar tersebut. Sehingga keberadaan pulau terluar akan terhindar dari segala bentuk ancaman, yang menyebabkan hilangnya pulau – pulau terluar sebagai batas wilayah Indonesia.</p>

	<p>c. Menjaga Kedaulatan NKRI.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Peran pemerintah terhadap kehidupan masyarakat sekitar pulau terluar perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga masyarakat memiliki rasa nasionalis yang tinggi dengan semangat bela negara.2) Kesiapan dari seluruh prajurit dalam melaksanakan tugas Pengamanan Pulau terluar.

Pada bagian pemecahan permasalahan Optimalisasi Peran Satgas TNI Pengamanan Pulau Terluar, metode yang digunakan untuk menganalisa, yaitu dengan metode SWOT untuk merumuskan solusi berupa kebijakan, strategi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh instansi dan seluruh *stake holder* terkait di bidangnya. Perumusan kebijakan, strategi dan upaya menggunakan analisa dengan metode SWOT dengan mempertimbangkan faktor-faktor baik kekuatan, kelemahan, peluang/internal dan kendala/eksternal yang terkait dengan Peran Satgas TNI Pengamanan Pulau Terluar, yaitu kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Faktor-faktor ini akan dijadikan sebagai perhitungan bobot, rating dan skor yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor *Strenght* atau Kekuatan yang terdiri dari:

- 1) Adanya dasar hukum Undang – undang RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.
- 2) Satgas TNI pada pengamanan pulau terluar merupakan garda terdepan untuk mengamankan pulau-pulau kecil terluar dari segala bentuk pelanggaran wilayah dan kegiatan ilegal dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
- 3) Dibentuknya badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), satgas dalam hal menjaga pengamanan pulau – pulau terluar.

b. Faktor *weakness* atau kelemahan yang terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan komando dan pengendalian yang saat ini dipandang tidak efektif.
- 2) Belum optimalnya sinergitas TNI dan Kementrian/Lembaga pemerintahan untuk meningkatkan pemberdayaan pulau terluar.
- 3) Belum optimalnya pemberdayaan sumber daya manusia yang akan melaksanakan penugasan pengamanan pulau terluar.

c. Faktor *opportunity* atau peluang yang terdiri dari:

- 1) Kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
 - 2) Kebijakan pemerintah melalui program Nawa Cita.
 - 3) Kebijakan pertahanan negara pada tahun 2018.
- d. Faktor *Threat* atau kendala yang terdiri dari:
- 1) Posisi Indonesia dikelilingi oleh dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta diapit oleh dua benua besar, yaitu Benua Asia dan Benua Australia.
 - 2) Kejahatan lintas negara.
 - 3) Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita dan dapat merusak ketahanan nasional.

Penentuan bobot faktor-faktor strategi ditentukan berdasarkan dari hasil wawancara yang meminta pendapat dari para ahli/*expert* sebanyak 10 personel yang terkait dengan Satgas TNI Pengamanan Pulau Terluar ini. Bobot merupakan nilai persentase sehingga jumlahnya 1 untuk masing-masing faktor internal dan faktor eksternal. Pemberian nilai tiap-tiap pernyataan dengan nilai NS = Negatif Signifikan (nilai 4), NTS = Negatif Tidak Signifikan (nilai 2), PTS = Positif Tidak Signifikan (nilai 2) dan PS = Positif Signifikan (nilai 4). Hasil penentuan bobot dan rating akan digunakan sebagai bahan analisis komponen SWOT yang selanjutnya digunakan untuk mendapatkan skor *IFAS* dan *EFAS*¹.

Tabel 2. Matriks hasil IFAS dan EFAS

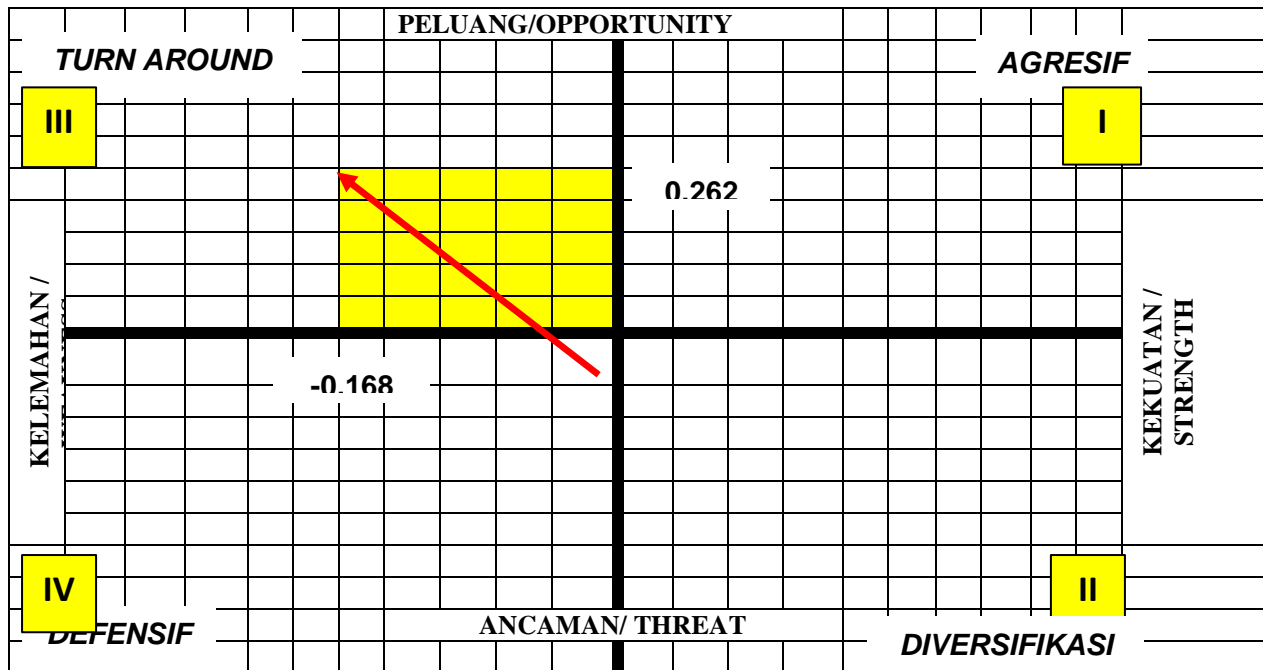
<i>Internal Factors Analysis Summary (IFAS)</i>		Bobot	Rating	SKOR B x R
Kekuatan (<i>Strength</i>)				
S1	Adanya dasar hukum Undang – undang RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.	0,159	3,700	0,588
S2	Satgas TNI pada pengamanan pulau terluar merupakan garda terdepan untuk mengamankan pulau-pulau kecil terluar dari segala bentuk pelanggaran wilayah dan kegiatan ilegal dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.	0,150	3,400	0,508
S3	Dibentuknya badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), satgas dalam hal menjaga pengamanan pulau – pulau terluar	0,173	3,800	0,657

¹ Rangkuti, F. (2009). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h.31

JUMLAH				1,753
Kelemahan (<i>Weakness</i>)				
W1	Pelaksanaan komando dan pengendalian yang saat ini dipandang tidak efektif.	0,173	3,700	0,640
W2	Belum optimalnya sinergitas TNI dan Kementrian/Lembaga pemerintahan untuk meningkatkan pemberdayaan pulau terluar	0,168	3,600	0,606
W3	Belum optimalnya pemberdayaan sumber daya manusia yang akan melaksanakan penugasan pengamanan pulau terluar.	0,178	3,800	0,675
JUMLAH		1	Selisih	1,921
				- 0,168
External Factors Analysis Summary (EFAS)		Bobot	Rating	SKOR B x R
Peluang (<i>Opportunity</i>)				
O1	Kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.	0,172	3,800	0,653
O2	Kebijakan pemerintah melalui program Nawa Cita.	0,167	3,600	0,603
O3	Kebijakan pertahanan negara pada tahun 2018	0,172	3,700	0,636
JUMLAH				1,892
Ancaman (<i>Threats</i>)				
T1	Posisi Indonesia dikelilingi oleh dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta diapit oleh dua benua besar, yaitu Benua Asia dan Benua Australia	0,167	3,400	0,569
T2	Kejahatan lintas negara	0,163	3,300	0,538
T3	Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita dan dapat merusak ketahanan nasional	0,158	3,300	0,523
JUMLAH		1	Selisih	1,63
				0,262

Sumber : Diolah (2018)

De mendapatkan selisih skor di dalam faktor *IFAS* dan *EFAS*, kemudian menentukan posisi kuadran (sumbu x dan sumbu y) yaitu $(x,y) = (-0,168, 0,262)$ dimana daerah tersebut berada di kuadran III area *Weakness* dan *Opportunity* seperti dijelaskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kuadran SWOT
Sumber : Diolah (2018)

Strategi utama yang digunakan adalah strategi W-O (mendukung strategi *Turn-around*) yaitu peluang yang dimiliki sangat besar, namun dilain pihak menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Oleh karena itu, fokus strategi adalah meminimalkan kelemahan internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Berdasarkan tabel IFAS, EFAS dan perhitungan kuadran maka dapat diketahui bahwa strategi W-O dengan kombinasi strategi seperti yang tersaji dalam matrix SWOT pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks SWOT

<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p>OPPORTUNITY</p> <p>1) Kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan Negara Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.</p> <p>2) Kebijakan pemerintah melalui program Nawa Cita</p> <p>3) Kebijakan pertahanan negara pada tahun 2018</p>	<p>THREATS</p> <p>1) Posisi Indonesia dikelilingi oleh dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta diapit oleh dua benua besar, yaitu Benua Asia dan Benua Australia</p> <p>2) Kejahatan lintas negara</p> <p>3) Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita dan dapat merusak ketahanan nasional</p>
-------------------------	--	--

<p style="text-align: center;">STRENGTH</p> <p>1) Adanya dasar hukum Undang – undang RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil.</p> <p>2) Satgas TNI pada pengamanan pulau terluar merupakan garda terdepan untuk mengamankan pulau-pulau kecil terluar dari segala bentuk pelanggaran wilayah dan kegiatan ilegal dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>3) Dibentuknya badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), satgas dalam hal menjaga pengamanan pulau – pulau terluar</p>	<p style="text-align: center;">Strategi S-O Menggunakan kekuatan memanfaatkan peluang</p> <p style="text-align: center;">Kombinasi Strategi:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">S101</td> <td style="width: 50%;">S301</td> </tr> <tr> <td>S102</td> <td>S302</td> </tr> <tr> <td>S103</td> <td>S303</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>S201</td> <td>S401</td> </tr> <tr> <td>S202</td> <td>S402</td> </tr> <tr> <td>S203</td> <td>S403</td> </tr> </table>	S101	S301	S102	S302	S103	S303	 	 	S201	S401	S202	S402	S203	S403	<p style="text-align: center;">Strategi S-T Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <p style="text-align: center;">Kombinasi Strategi:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">S1T1</td> <td style="width: 50%;">S3T1</td> </tr> <tr> <td>S1T2</td> <td>S3T2</td> </tr> <tr> <td>S1T3</td> <td>S3T3</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>S2T1</td> <td>S4T1</td> </tr> <tr> <td>S2T2</td> <td>S4T2</td> </tr> <tr> <td>S2T3</td> <td>S4T3</td> </tr> </table>	S1T1	S3T1	S1T2	S3T2	S1T3	S3T3	 	 	S2T1	S4T1	S2T2	S4T2	S2T3	S4T3
S101	S301																													
S102	S302																													
S103	S303																													
S201	S401																													
S202	S402																													
S203	S403																													
S1T1	S3T1																													
S1T2	S3T2																													
S1T3	S3T3																													
S2T1	S4T1																													
S2T2	S4T2																													
S2T3	S4T3																													
<p style="text-align: center;">WEAKNESS</p> <p>1) Pelaksanaan komando dan pengendalian yang saat ini dipandang tidak efektif.</p> <p>2) Belum optimalnya sinergitas TNI dan Kementerian/Lembaga pemerintahan untuk meningkatkan pemberdayaan pulau terluar</p> <p>3) Belum optimalnya pemberdayaan sumber daya manusia yang akan melaksanakan penugasan pengamanan pulau terluar.</p>	<p style="text-align: center;">Strategi W-O Meminimalkan kelemahan Memanfaatkan peluang</p> <p style="text-align: center;">Kombinasi Strategi:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">W101</td> <td style="width: 50%;">W301</td> </tr> <tr> <td>W102</td> <td>W302</td> </tr> <tr> <td>W103</td> <td>W303</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>W201</td> <td>W401</td> </tr> <tr> <td>W202</td> <td>W402</td> </tr> <tr> <td>W203</td> <td>W403</td> </tr> </table>	W101	W301	W102	W302	W103	W303	 	 	W201	W401	W202	W402	W203	W403	<p style="text-align: center;">Strategi W-T Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman</p> <p style="text-align: center;">Kombinasi Strategi:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">W1T1</td> <td style="width: 50%;">W3T1</td> </tr> <tr> <td>W1T2</td> <td>W3T2</td> </tr> <tr> <td>W1T3</td> <td>W3T3</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>W2T1</td> <td>W4T1</td> </tr> <tr> <td>W2T2</td> <td>W4T2</td> </tr> <tr> <td>W2T3</td> <td>W4T3</td> </tr> </table>	W1T1	W3T1	W1T2	W3T2	W1T3	W3T3	 	 	W2T1	W4T1	W2T2	W4T2	W2T3	W4T3
W101	W301																													
W102	W302																													
W103	W303																													
W201	W401																													
W202	W402																													
W203	W403																													
W1T1	W3T1																													
W1T2	W3T2																													
W1T3	W3T3																													
W2T1	W4T1																													
W2T2	W4T2																													
W2T3	W4T3																													

Perumusan kebijakan diperlukan sebagai pedoman dasar dalam menentukan strategi pencapaian sebelum di aktualisasikan dalam upaya-upaya nyata. Sebagai pemecahan masalah, selanjutnya akan dirumuskan dan disusun kebijakan, strategi dan upaya. Perumusan kebijakan sebagai solusi dari masalah dan pokok persoalan dengan

mempertimbangkan peluang dan kendala serta untuk mencapai sasaran sesuai dengan indikator keberhasilan.

a. Kebijakan.

Guna meningkatkan pemberdayaan pulau terluar Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan NKRI maka perlu disusun suatu kebijakan untuk mengoptimalkan peran satgas TNI dalam pengamanan pulau terluar. Kebijakan disusun berdasarkan kondisi saat ini dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mengoptimalkan peran satgas TNI. Namun demikian adanya perkembangan lingkungan strategis baik dalam ruang lingkup global, regional dan nasional yang selalu dinamis maka tidak bisa dihindari adanya peluang dan kendala dalam mencapai sasaran maupun tujuan yang diharapkan. Peluang dan kendala tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan yang diinginkan yaitu optimalnya peran satgas TNI pengamanan pulau terluar guna meningkatkan pemberdayaan pulau terluar Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Kebijakan yang ditetapkan untuk mewujudkan optimalnya optimalnya peran satgas TNI pengamanan pulau terluar adalah:

“Terwujudnya peran satgas TNI pengamanan pulau terluar yang optimal melalui pengalihan kodal dari Pangdam I/BB dan Pangdam Iskandar Muda kepada Pangkoarmada I, meningkatkan sinergitas antara TNI dan Kementerian/Lembaga pemerintah terkait dalam pengelolaan dan pemberdayaan pulau-pulau terluar serta profesionalisme prajurit yang melaksanakan tugas pengamanan pulau terluar guna meningkatkan pemberdayaan pulau terluar Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.”

b. Strategi.

Dalam penentuan strategi terdiri dari tiga unsur, yaitu sarana yang tersedia (*means*), cara yang akan digunakan (*ways*), dan tujuan yang telah ditetapkan (*ends*). Strategi ini digunakan untuk mewujudkan kebijakan yang telah digariskan dan berdasarkan hasil analisa SWOT. Oleh karena itu, disusunlah beberapa strategi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Strategi–strategi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi I. Mewujudkan pelaksanaan komando dan pengendalian satgas TNI pengamanan pulau terluar secara efektif dan efisien dibawah komando dan pengendalian Pangkoarmada I melalui implemmentasi Kebijakan pertahanan negara tahun 2018 berpedoman pada visi, misi dan program pemerintah,

termasuk kebijakan Poros Maritim Dunia dan pengembangan kawasan, guna meningkatkan pemberdayaan pulau terluar Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.

- 2) Strategi II. Mewujudkan terjalinnya sinergitas TNI dalam hal ini Satgas TNI pengamanan pulau terluar dengan Kementrian/Lembaga pemerintahan secara optimal melalui kebijakan pemerintah dengan program Nawa Cita, untuk meningkatkan pemberdayaan pulau terluar dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa pesisir dalam kerangka Negara Kesatuan, guna meningkatkan pemberdayaan pulau terluar Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.
- 3) Strategi III. Mewujudkan peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia dalam melaksanakan penugasan pengamanan pulau terluar melalui pembekalan tentang pembinaan potensi maritim kepada personil yang tergabung dalam satgas pengamanan pulau terluar sebelum melaksanakan penugasan guna meningkatkan pemberdayaan pulau terluar Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.

c. Upaya

Untuk dapat mewujudkan kebijakan yang telah di ambil guna meningkatkan pemberdayaan pulau – pulau terluar khususnya di wilayah barat melalui optimalisasi peran satgas TNI pengamanan pulau terluar, maka upaya – upaya yang dapat dilakukan meliputi :

1. Upaya untuk mendukung strategi 1 : Mewujudkan pelaksanaan komando dan pengendalian satgas TNI pengamanan pulau terluar secara efektif dan efisien dibawah komando dan pengendalian Pangkoarmada I melalui implemementasi Kebijakan pertahanan negara tahun 2018 berpedoman pada visi, misi dan program pemerintah, termasuk kebijakan Poros Maritim Dunia dan pengembangan kawasan, guna meningkatkan pemberdayaan pulau terluar Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.
2. Upaya untuk mendukung strategi II : Mewujudkan terjalinnya sinergitas TNI dalam hal ini Satgas TNI pengamanan pulau terluar dengan Kementrian/Lembaga pemerintahan secara optimal melalui kebijakan pemerintah dengan program Nawa Cita, untuk meningkatkan pemberdayaan pulau terluar dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

- desa pesisir dalam kerangka Negara Kesatuan, guna meningkatkan pemberdayaan pulau terluar Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.
3. Upaya untuk mendukung strategi III : Mewujudkan peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia dalam melaksanakan penugasan pengamanan pulau terluar melalui pembekalan tentang pembinaan potensi maritim kepada personil yang tergabung dalam satgas pengamanan pulau terluar sebelum melaksanakan penugasan guna meningkatkan pemberdayaan pulau terluar Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.



Gambar 2. Foto Kegiatan

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang bagaimana mewujudkan optimalisasi peran satgas TNI pengamanan pulau terluar guna meningkatkan pemberdayaan pulau terluar Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, maka dirumuskan beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa peran satgas TNI pengamanan pulau terluar Indonesia akan sangat membantu dalam meningkatkan pemberdayaan pulau terluar Indonesia khususnya dalam pembahasan pada kertas karya Perorangan ini peneliti membahas di wilayah Barat, apabila dikendalikan oleh satuan yang tepat. Komando dan pengendalian untuk mengoptimalkan peran satgas TNI pengamanan pulau terluar sangatlah berpengaruh, karena dengan Komando dan pengendalian yang mengetahui tentang ilmu dan pengetahuan tentang kelautan dan kemaritiman maka kan memudahkan bagi satgas untuk melaksanakan tugasnya dan mengoptimalkan perannya di pulau terluar. Saat ini komando dan pengendalian yang berada di bawah Komando Daerah Milliter (KODAM) sebaiknya perlu diadakan alih kodal kepada salah satu Kotama jajaran TNI AL dalam hal adalah Koarmada I karena Koarmada satu memiliki wilayah dan jangkauan operasi sampai ke daerah pulau – pulau terluar di wilayah barat yaitu Pulau Rondo, Pulau Berhala dan Pulau Sekatung. Dan

juga kegiatan patroli atau kegiatan operasi rutin dari Koarmada I sudah berjalan dengan baik dan dapat di sinkronkan dengan operasi pengamanan pulau terluar.

Dalam meningkatkan pemberdayaan pulau terluar perlu adanya sinergitas TNI dan Kementerian/Lembaga pemerintahan terkait, sehingga peran Satgas TNI pengamanan pulau terluar dapat di optimalkan. Kebersamaan antara TNI dan Kementerian/Lembaga untuk meningkatkan pemberdayaan pulau terluar dapat diwujudkan dalam peran Satgas TNI pengamanan pulau terluar. Hingga saat ini dari hasil pengalaman secara empiris dari peneliti dan juga wawancara dengan mantan Dansatgas pengamanan pulau terluar belum ada dirasakan wujud nyata serasa langsung keterlibatan dari Kementerian/Lembaga dalam pemberdayaan pulau terluar, diharapkan kedepan adanya regulasi yang menitik beratkan keterlibatan TNI dalam pemberdayaan pulau terluar Indonesia, hal itu di sebabkan hanya anggota TNI yang menduduki dari pulau yang tak berpenduduk tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya sinergitas tersebut peran dari Satgas TNI pengamanan pulau terluar dapat lebih optimal.

Pemberdayaan sumber daya manusia yang lebih optimal tentunya menjadi faktor dominan dalam mengoptimalkan peran Satgas TNI pengamanan pulau terluar. Sumber Daya Manusia merupakan kunci utama keberhasilan dalam suatu pelaksanaan tugas, dengan memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi personil – personil yang akan melaksanakan tugas pengamanan pulau terluar dapat menjawab permasalahan yang dikatakan bahwa personil Satgas tidak memiliki kemampuan dalam hal pemberdayaan pulau terluar. Pelatihan – pelatihan baik dalam praktek langsung maupun secara teori tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan dari prajurit yang akan melaksanakan tugas pengamanan pulau terluar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, E., Eidman E., dan Andrianto, L.2007. Buletin Perikanan, 7 (2), <https://media.neliti.com/media/publications/11028-ID-tinjauan-hukum-dan-kebijakan-pengelolaan-pulau-pulau-kecil-terluar-indonesia-stu.pdf>
- Dharma Wiratama.2010. *Majalah seskoal No. DW/149/2010 h.25*
- Ditjen Strahan.2007. *Optimalisasi Penanganan Wilayah Perbatasan Maritim Ri-Rdtl Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI*. Terbatas
- Kemhan.2010. *Optimalisasi Pengelolaan 12 Pulau – Pulau Kecil Terluar Yang Berbatasan Dengan Negara Tetangga Guna Memperkuat Batas Maritim NKRI*, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwji0_Ok_-3wAhUr8XMBHWg-DVIQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.kemhan.go.id%2Fstrahan%2Fwp-content%2Fuploads%2Fmigrasi%2FProduk%2FOptimal_ppkt.pdf&usg=AOvVaw0cr2pdwSJ-nEI823-RKcvS
- Makahingide, Randy.2021. *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Persoalan Di Wilayah Perbatasan Antara Pulau Marore Dan Philipina Selatan*. Jurnal Politico, 10 (2), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/31531/30141>



- Sasmini.2009.*Pengelolaan dan Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*. Artikel Hukum Internasional.<https://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/11/03/pengelolaan-dan-pengamanan-pulau-pulau-terluar-indonesia/>
- Talumantak.2018.*Penegakan Hukum Terhadap Pulau Pulau Terluar Indonesia Untuk Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*.Jurnal Lex Et Societatis, 6(10), 134-145, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/22836>akan ke II. Jakarta : Teraju
- Wahyono .S. K..2009. *Indonesia Negara Maritim*. Cetakan II. Jakarta : Teraju